



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2025



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tidak dapat terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penetapan Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada perubahan APBD Tahun 2025.

Kendal,

2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal



MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par

Pembina Tingkat I

NIP. 19670917 199103 1 008

PARAP HIRARKIS	
PEJABAT	TGL.
1. Sekretaris Daerah	
2. Ka Badan	
3. Sekretaris	
4. Ka Bidang	
5. Kabid/ Kasubag/ Kasi	
6. Kasi	

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar i

Daftar Isiii

BAB I. PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 5

 1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... 8

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah 8

 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 26

BAB IV. PENUTUP 31

Lampiran Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Kendal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang kemudian disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan I dan II untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, menyelaraskan serta mendasarkan kegiatan prioritas yang masih dilaksanakan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga diatur tentang tatacara Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah yaitu dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud meliputi perubahan :

- a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. target sasaran pembangunan daerah;
- c. prioritas pembangunan daerah;
- d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 disusun dengan tahapan :

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 merupakan bagian penjabaran dari perencanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Kendal dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Mempedomani Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan atau tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Baperlitbang atau Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Kendal yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi yang menunjukkan perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan :

- 1) Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan.

- 2) Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar OPD, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan.
- 3) Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2024 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2025.
- 4) Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota yang kemudian menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra PD dan Perubahan Renja PD untuk menyusun rancangan perubahan APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Perangkat Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Kendal.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17).
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
17. Keputusan Bupati Kendal Nomor 050/102/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah tersusunnya dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah jangka menengah dan panjang .

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan dengan tugas dan fungsinya;
- b. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan capaian dan proyeksi kinerja program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- c. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan lokasi kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan indikator kinerja kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- e. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan kelompok sasaran kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran;
- f. Memberikan acuan yang lebih rasional bagi Perangkat Daerah dalam menyelaraskan sertamemproyeksi pendanaandalam rangka menyelaraskan dinamika pelayanan sampai akhir tahun anggaran;
- g. Memberikan pedoman pembangunan tahun 2025 bagi Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi ulasan yang mencakup isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan serta sumber dana.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal mendukung dan berkontribusi dalam mencapai salah satu tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi” yang fokus pada penerapan strategi daerah yaitu Perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal di tahun 2025 sampai dengan Triwulan II secara umum masih selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyelarasan dan penyempurnaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Triwulan II menunjukkan kinerja yang optimal, selaras dan masih *on the track* dengan target serta capaian yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari berjalannya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selaku unit kerja yang terkait tugas dan fungsinya sebagai penyedia/penunjang pelayanan publik di bidang umum pada lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kendal.

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah. Hal ini berpengaruh pada tahap perencanaan anggaran terkait dinamika penganggaran dengan kebutuhan insidentil/tidak terduga yang sulit diprediksi sebelumnya dan terkait penunjang pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penunjang pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja setiap kegiatan serta kebutuhan rutin pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi terhadap usulan rencana kebutuhan barang yang masuk serta proyeksi cadangan bagi kebutuhan insidentil/tidak terduga merupakan unsur terpenting dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada setiap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kendal untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan *outcome* atas capaian target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi penyediaan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada seiring dinamika yang terus berkembang mengikuti mekanisme serta kebijakan yang ada. Sinkronisasi dalam setiap langkah perencanaan menjadi pola rutin karena Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal sebagai unsur penunjang mempunyai tugas penting dalam memenuhi dan melayani masyarakat umum guna menunjang capaian program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Sebagai catatan khusus bagi pelaksanaan program/kegiatan yang mempunyai capaian realisasi anggaran rendah disamping realisasi fisiknya juga tidak mencapai hasil maksimal, seperti pada Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD; Verifikasi Perubahan DPA SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah; Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya; Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota; Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah. Hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang diantaranya meliputi pertimbangan hasil kajian, kebijakan maupun mekanisme yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan sepenuhnya berdasarkan prioritas dan peraturan perundangan yang ada.

Dalam pelaksanaan serta evaluasi yang berjalan, beberapa program/kegiatan perlu adanya perubahan pada rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal guna mengakomodasi serta menyelaraskan terhadap berbagai dinamika kebutuhan prioritas yang berkembang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dengan penyesuaian atas APBD Tahun 2025.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2025, dinamika kebutuhan yang sedang berkembang serta faktor efisiensi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan optimalisasi capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada.

Pada tahun 2025 belanja operasi diarahkan guna mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas guna mendukung arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025. Sedangkan untuk belanja pegawai, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan keuangan daerah Kabupaten Kendal.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Renja
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025
BPKAD Kab. Kendal

No	Program / Kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Prosentase Kinerja
1	2	3		4	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	3	75 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	8	4	50 %
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0,5	50 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	8	57,14 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	40	0	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3	1	33,33%
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	4	1	25%
8	Penyediaan bahan logistik kantor	Paket	12	6	50%
9	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Paket	3	1	33,33%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	12	0	0%

11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	4	33,33%
12	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1000	500	50%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
13	Pengadaan Mebel	Unit	120	0	0%
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
14	Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4	33,33%
15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	6	50%
16	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	6	50%
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
17	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	81	30	37,04%
18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	3	25%
19	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Paket	1	0,5	50%
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
20	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen	2	0	0%
21	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	0	0%
22	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen	53	20	37,74%
23	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	53	0	0%
24	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen	107	0	0%
25	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	107	0	0%
26	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	0,5	50%
27	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	0	0%
28	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	12	6	50%

	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
29	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	6	3	50%
30	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan	184	60	32,6%
31	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2	0,5	25%
32	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	5	1	20%
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
33	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	79	26	32,91%
34	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	5	1	20%
35	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	51	20	39,22%
36	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	0	0%
37	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	0,5	25%
38	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	31	10	32,26%
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
39	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	266	133	50%
40	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	0,25	25%

41	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Laporan	1	0	0
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				
42	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2	0	0%
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
43	Penyusunan Standar Harga	Dokumen	1	0,2	20%
44	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	1	50%
45	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	0,1	10%
46	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	1	0,5	50%
47	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	2	40%
48	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	12	6	50%
					29,42%

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target program/kegiatan :
- Ketidaksesuaian antara rencana dan kebutuhan;
 - Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program/kegiatan;
 - Kurangnya koordinasi/sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan;
 - Perubahan kebijakan/regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan program/kegiatan.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan :
- Perencanaan yang realistis dan terukur, didukung dengan data dan informasi yang akurat;
 - Sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran yang cukup dan fasilitas infrastruktur yang memadai;
 - Koordinasi dan kerjasama yang baik;
 - Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi atau tantangan yang muncul.

c. Faktor-faktor penyebab melebihi target program/kegiatan :

- Penggunaan metode perencanaan yang inovatif dan strategi yang melebihi ekspektasi;
- Memiliki tim yang sangat terampil, berdedikasi, dan berpengalaman yang dapat melebihi kinerja yang diharapkan serta anggaran yang lebih dari cukup;
- Koordinasi dan komunikasi internal yang sangat baik juga didukung komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal;
- Kemampuan untuk mengadaptasi ide-ide baru dan metode yang meningkatkan efisiensi dan hasil

Implikasi positif yang timbul dari target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu :

1. Peningkatan Kinerja Organisasi
2. Kepuasan Masyarakat
3. Pengelolaan Anggaran yang Lebih Baik
4. Peningkatan Moral dan Motivasi Tim
5. Peluang untuk Pengembangan Lebih Lanjut

Sedangkan implikasi negatif yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu :

1. Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, mempengaruhi kualitas dan hasil akhir dari program, serta menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat;
2. Penurunan Kepercayaan dan Kepuasan Publik;
3. Masalah dalam Pengelolaan Sumber Daya;
4. Mempengaruhi motivasi dan semangat kerja tim;
5. Peningkatan Kebutuhan Perbaikan dan Evaluasi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah :

1. Perencanaan yang lebih baik, disertai evaluasi, studi kelayakan, analisis kebutuhan dan analisis risiko dan dampak;
2. Penganggaran yang efektif berbasis kinerja yang fleksibel dan transparan serta pengawasan dan pemantauan berkala;
3. Peningkatan kapasitas dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf terkait perencanaan dan penganggaran;
4. Komunikasi internal yang jelas dan terbuka antara semua unit dan pihak terkait;
5. Menyiapkan mekanisme untuk menangani masalah atau kendala dengan cepat dan efektif.

a. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang capaian Visi dan Misi Kabupaten Kendal Tahun 2021 - 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mendukung dan berkontribusi dalam mencapai salah satu tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi” yang fokus pada penerapan strategi daerah yaitu Perbaikan tata kelola pemerintahan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan Kabupaten Kendal yang menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal.

Upaya untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 ditunjang dengan beberapa sinkronisasi kegiatan prioritas yang rutin dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal selama tahun anggaran 2024 demi menunjang terwujudnya reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal .

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam merumuskan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi : 3 program 13 kegiatan dan 48 sub kegiatan masih perlu diselaraskan dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah “Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat ” melalui beberapa rumusan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan guna memperlancar dan mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Kabupaten Kendal yaitu “Mewujudkan Reformasi Birokrasi”.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal merupakan unsur dari Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kendal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yang masing-masing menjalankan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021_Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis di bidang keuangan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal memiliki Standar Pelayanan dan tetap berpedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kebijakan yang berlaku demi terwujudnya pelayanan yang prima guna menunjang keberhasilan program/kegiatan yang ada, mewujudkan pelayanan publik disamping memenuhi ketertiban dalam mengelola ketatausahaan. Selama ini kesiapan serta ketepatan waktu selalu menjadi prioritas utama pelayanan yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. Baik dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup internal Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal maupun di luar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 secara umum memperlihatkan hasil kinerja yang cukup optimal, masih *on the track* pada target/proyeksi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menunjang capaian program pembangunan daerah diperlukan penyesuaian terhadap dinamika yang berkembang khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, guna mengoptimalkan kinerja, tugas dan fungsi Badan pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal unit kerja pelayanan publik, penyedia serta penunjang kegiatan semua unit kerja di lingkungan Kabupaten Kendal .

Perubahan dalam rangka penyelarasan terhadap beberapa program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal difokuskan demi menunjang terwujudnya reformasi birokrasi dan menyajikan pelayanan prima khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal serta pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kendal.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	IKU/IKK/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian	Proyeksi	Capaian Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Indikator Kinerja Utama											
1	IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	-	79,325	79,326	79,327	79,327	79,328	79,329	75,56	79,00	95,25%
Indikator Program											
1	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
2	Prosentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
3	Prosentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (Kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
4	Prosentase OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
5	Prosentase Sistem Keuangan yang Terintegrasi	-	50	50	50	50	50	50	50	50	100%
6	Prosentase aset daerah yang dikelola dengan baik	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

b. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terdapat beberapa isu penting yang sering muncul. Berikut beberapa isu yang dapat memengaruhi kinerja dan efektivitas BPKAD :

1. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah kadang tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan. Perubahan prioritas, keterlambatan pencairan dana, dan kurangnya monitoring dapat menyebabkan realisasi anggaran yang tidak efisien;
2. Banyak aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan dan bangunan yang terbengkalai, atau aset yang tidak tercatat dengan baik dalam sistem;
3. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik serta potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi;
4. Pengawasan internal terhadap pengelolaan anggaran dan aset sering kali tidak berjalan efektif, baik karena kurangnya sumber daya manusia yang terlatih maupun sistem pengawasan yang belum optimal;
5. Tidak terintegrasinya pengelolaan keuangan dan aset daerah, menyebabkan data yang tersebar di berbagai tempat dan sulit dipantau secara *real-time*;
6. Tidak semua pegawai di BPKAD memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan regulasi keuangan yang terus berubah;
7. Ada ketidaksinkronan antara rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan alokasi anggaran yang disusun oleh BPKAD;
8. Peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan aset sering kali berubah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini memerlukan penyesuaian yang cepat oleh BPKAD, yang sering kali menimbulkan kesulitan;
9. Koordinasi antara BPKAD dengan dinas-dinas lain seringkali belum berjalan optimal, baik dalam hal sinkronisasi program maupun pengelolaan anggaran dan aset;
10. Pemanfaatan teknologi informasi di BPKAD seringkali masih minim atau tidak dioptimalkan untuk proses pengelolaan yang lebih efektif, seperti dalam hal pelaporan keuangan secara digital atau pengelolaan aset secara *online*.

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 2,01 01									
01	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah								
01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
01 2 01 05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dokumen (Renja,RKA,DPA, Progran Kerja)	4 dokumen	3 dokumen	75	4 dokumen	4 dokumen	100
01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	8 dokumen (Sakip,LPPD,LKPJ, Lapor,POK,RB,ZI, SPIP)	8 dokumen	4 dokumen	50	8 dokumen	8 dokumen	100
01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Kendal Expo	1 laporan	1 laporan	0,5	50	1 laporan	1 laporan	100
01 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah								
01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	14 bulan	14 bulan	8 bulan	57,14	14 bulan	14 bulan	100

01	2	05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
01	2	05		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang dikirim diklat	20 orang	40	0	0	20 orang	0	0
01	2	06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
01	2	06		02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan	3 paket	3 paket	1 paket	33,33	3 paket	3 paket	100
01	2	06		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	4 paket	1 paket	25	4 paket	4 paket	100
01	2	06		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos penyediaan makan minum rapat	12 paket	12 paket	6 paket	50	12 paket	12 paket	100
01	2	06		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan / penggandaan	8 paket	3 paket	1 paket	33,33	8 paket	8 paket	100
01	2	06		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan bacaan	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	12 Dokumen	12 Dokumen	100
01	2	06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah bulan keg.rapat koordinasi dan konsultasi	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	33,33	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2	06		10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah kegiatan penyusutan arsip	1000 Dokumen	1000 Dokumen	500 Dokumen	50	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	100
01	2	07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
01	2	07		06	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang diadakan	5 unit	0 unit	0	0	0 unit	0 unit	0
01	2	08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	2	08		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	33,33	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2	08		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2	08		04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran honor penatausahaan keuangan tenaga keamanan, tenaga kebersihan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	12 Laporan	100
01	2	09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

01	2	09		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang berizin	81 unit	81 unit	30 unit	37,04	81 unit	81 unit	100
01	2	09		06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Bulan terpeliharanya Peralatan dan Mesin	12 Unit	12 Unit	3 Unit	25	12 Unit	12 Unit	100
01	2	09		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,5	50	1 Unit	1 Unit	100
02					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								
02	2	01			Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran								
02	2	01		01	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	dok KUAPPAS YANG DISUSUN	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100
02	2	01		02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	JUMLAH DOK PERUBAHAN KUAPPAS YANG DISUSUN	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100
02	2	01		03	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	jumlah OPD yang terverifikasi dok RKA	53 dokumen	53 dokumen	20 dokumen	37,74	53 dokumen	53 dokumen	100
02	2	01		03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	53 dokumen	53 dokumen	0	0	53 dokumen	53 dokumen	100
02	2	01		05	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA OPD yang terverifikasi	107 dokumen	107 dokumen	20 dokumen	18,69	107 dokumen	107 dokumen	100
02	2	01		05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	107 dokumen	107 dokumen	0	0	107 dokumen	107 dokumen	100
02	2	01		07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 dokumen	1 dokumen	0,5 dokumen	50	1 dokumen	1 dokumen	100
02	2	01		08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100

02	2	01		09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	12 dokumen	12 dokumen	100
02	2	02			Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan								
02	2	02		01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah laporan yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50	6 dokumen	6 dokumen	100
02	2	02		05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah dok laporan pengelolaan dana perimbangan dan transfer (gaji dan bankeu)	184 Laporan	184 Laporan	60 Laporan	32,6	184 Laporan	184 Laporan	100
02	2	02		09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait -Rekonsiliasi Gaji -Rekonsiliasi BPJS	2 dok	2 dokumen	0,5 dokumen	25	2 dokumen	2 dokumen	100
02	2	02		10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	jumlah dok kebijakan yang disusun (SK PEJABAT PENGOLAAN KEUANGAN, BESARAN UP, JUKNI PENGELOLAAN	5 dok	5 dokumen	1 dokumen	20	5 dokumen	5 dokumen	100
02	2	03			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								
02	2	03		01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	79 Laporan	79 Laporan	26 Laporan	32,91	79 Laporan	79 Laporan	100
02	2	03		03	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	5	5 Dokumen	5 Dokumen	100
02	2	03		04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	51 Laporan	51 Laporan	20 Laporan	39,22	51 Laporan	51 Laporan	100

02	2	03		06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100
02	2	03		09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait penyusunan LK	2 Dokumen	2 Dokumen	0,5 Dokumen	25	2 Dokumen	2 Dokumen	100
02	2	03		11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	31 orang	10 orang	32,26	158 orang	158 orang	100
02	2	04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah desa penerima DD,ADD, bagi hasil pajak dan retribusi							
02	2	04		08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	266 Laporan	266 Laporan	133 Laporan	50%	266 Laporan	266 Laporan	100
02	2	04		09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	100
02	2	04		10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1 Laporan	1 Laporan	100
02	2	05			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup								
02	2	05		02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	0	0	2 dokumen	2 dokumen	100
03					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								
03	2	01			Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah								
03	2	01		01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,2 Dokumen	20%	1 Dokumen	1 Dokumen	100
03	2	01		03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	2 Dokumen	100

03	2	01		05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset BMD yang terpeliharanya	1 Laporan	1 Laporan	0,1 Laporan	10%	1 Laporan	1 Laporan	100
03	2	01		06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,5 Laporan	50%	1 Laporan	1 Laporan	100
03	2	01		10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	40%	5 Dokumen	5 Dokumen	100
03	2	01		12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	12 Dokumen	12 Dokumen	100

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mendasari Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tugas BPKAD membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Sehingga BPKAD tidak menampung usulan program dan kegiatan masyarakat, hanya menunjang kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh dinas teknis lain.

Tabel 2.4

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

[illegible]

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 tetap mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah dan dinamika yang berkembang. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2025. Dinamika yang sedang berkembang memerlukan langkah rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang diharapkan mampu mengoptimalkan capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada. Sedangkan untuk belanja tidak langsung juga diakomodir dalam perubahan rencana kerja tahun 2025, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Adapun rincian yang mencakup penyeselarasan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan serta sumber dana terdapat pada Pedoman Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perubahan dalam Program di Renja BPKAD Tahun 2025 memuat penambahan/pengurangan pagu, target kinerja, serta pergeseran kegiatan, seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/ Kegiatan	Sumber Dana	PENETAPAN		PERUBAHAN	
			Target Capaian	Pagu RKPD (Rp)	Target Capaian	Pagu RKPD (Rp)
1	2		4		5	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	8.613.365.755	100%	8.351.710.585
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Dokumen	160.798.000	11 Dokumen	92.650.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Dokumen	95.808.000	4 Dokumen	42.650.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8 Laporan	14.230.000	0 Dokumen	0
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	50.760.000	1 Laporan	50.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14 Bulan	5.706.122.505	14 Bulan	6.477.165.635
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	40 Orang	5.706.122.505	40 Orang	6.477.165.635
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		61 Orang	50.000.000	61 Orang	0
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20 Orang	50.000.000	20 Orang	0
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	1.720.895.250	12 Bulan	1.033.569.234
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 Paket	133.413.500	3 Paket	101.908.000
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 Paket	52.205.950	4 Paket	15.385.750
9	Penyediaan bahan logistik kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Paket	56.820.000	12 Paket	56.820.000
10	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 Paket	145.418.000	3 Paket	70.527.084
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Dokumen	2.270.000	12 Dokumen	0
12	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	1.236.067.800	12 Laporan	734.643.900
13	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1000 Dokumen	94.700.000	1000 Dokumen	54.284.500
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11 Unit	105.000.000	11 Unit	180.000

14	Pengadaan Mebel	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120 Unit	0	0	0
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	7 Unit	105.000.000	7 Unit	180.000
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	539.600.000	12 Bulan	537.385.716
16	Penyediaan jasa surat menyurat	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	12.000.000
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	280.000.000	12 Laporan	275.204.500
18	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	239.600.000	12 Laporan	250.181.216
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		94 Unit	330.950.000	94 Unit	210.760.000
19	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	81 Unit	175.000.000	81 Unit	130.000.000
20	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Unit	105.950.000	12 Unit	80.760.000
21	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Unit	50.000.000	1 Unit	0
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	417.545.252.977	100%	414.600.316.950
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		5 Dokumen	1.254.022.000	5 Dokumen	217.860.400
22	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	51.603.000	2 Dokumen	13.725.750
23	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	57.403.000	2 Dokumen	14.800.700
24	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53 Dokumen	59.500.000	53 Dokumen	6.025.000
25	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53 Dokumen	35.750.000	53 Dokumen	3.875.000
26	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	107 Dokumen	48.500.000	0	0
27	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	107 Dokumen	24.750.000	0	0
28	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	174.136.000	1 Dokumen	147.975.000

29	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	113.734.000	2 Dokumen	27.510.000
30	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Dokumen	688.646.000	12 Dokumen	3.948.950
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		49 OPD	437.570.000	49 OPD	146.836.500
31	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6 Dokumen	233.840.000	6 Dokumen	1001.915.000
32	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	184 Laporan	17.330.000	184 Laporan	8.495.000
33	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	102.950.000	2 Dokumen	34.145.000
34	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Dokumen	83.450.000	5 Dokumen	2.281.500
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		51 OPD	279.058.000	51 OPD	101.498.800
35	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	79 Laporan	60.565.000	79 Laporan	30.139.000
36	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Laporan	129.545.000	5 Dokumen	57.394.800
37	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51 Laporan	34.136.000	51 Laporan	840.000
38	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	4.811.000	2 Dokumen	750.000

39	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	18.580.000	2 Dokumen	3.825.000
40	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31 Orang	31.421.000	158 Orang	8.550.000
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		266 Laporan	415.533.722.977	266 Laporan	414.094.121.250
39	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	266 Laporan	377.177.014.550	266 Laporan	365.867.105.377
40	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	7.500.000.000	1 Laporan	5.000.000.000
41	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	30.856.708.427	1 Laporan	43.227.015.873
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		2 Dokumen	40.880.000	2 Dokumen	40.880.000
42	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	40.880.000	2 Dokumen	40.000.000
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	3.986.440.000	100%	1.215.611.500
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	3.986.440.000	100%	1.215.611.500
43	Penyusunan Standar Harga	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	143.400.000	1 Dokumen	144.787.500
44	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	6.125.000
45	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	207.600.000	1 Laporan	260.320.000
46	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	78.995.000
47	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Dokumen	315.600.000	5 Dokumen	544.100.000
48	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	3.219.840.000	6 Dokumen	181.284.000
				430.145.058.732		424.167.639.035

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2025 yang telah ditetapkan merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelarasan program/kegiatan pada Perubahan Renja 2025 lebih bersifat prioritas dan mendesak untuk diakomodir sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal ini sebagai penyesuaian atas proyeksi serta dinamika yang terjadi sampai akhir tahun anggaran, dan dipergunakan sebagai acuan kinerja dalam melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, sehingga rencana kerja dapat lebih terarah dan terukur sesuai perencanaan dan kaidah yang ada. Dan ini diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, dalam menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Akhir kata, semoga Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik, disertai kerja keras dan dedikasi tinggi dari segenap aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Kendal, 2025

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal


MARDI EDI SUSILO, SE.Par, M.Par
Pembina Tingkat I
NIP. 19670917 199103 1 008

PARAP HIRARKIS		
PEJABAT	TGL.	PARAF
1. Sekretaris Daerah		
2. Ka Badan		
3. Sekretaris		
4. Ka Bidang		
5. Kasubid/ Kasubag/ IPTB		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								430.145.058.732,00	438.967.745.173,00	424.167.639.035,00	-5.977.419.697,00						459.076.500.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							430.145.058.732,00	438.967.745.173,00	424.167.639.035,00	-5.977.419.697,00							459.076.500.000,00		
	5.02	KEUANGAN							430.145.058.732,00	438.967.745.173,00	424.167.639.035,00	-5.977.419.697,00							459.076.500.000,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah					100 %	100 %	8.613.365.755,00	11.673.483.317,00	8.351.710.585,00	1.046.134.245,00						9.659.500.000,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun					11 Dokumen	11 Dokumen	160.798.000,00	107.318.000,00	92.650.000,00	-68.148.000,00			-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Perangkat Daerah		171.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	95.808.000,00	39.228.000,00	42.650.000,00	-53.158.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					8 Laporan	8 Laporan	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	-14.230.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			16.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	50.760.000,00	53.860.000,00	50.000.000,00	-760.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN					14 Bulan	14 Bulan	5.706.122.505,00	7.904.967.067,00	6.477.165.635,00	771.043.130,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Perangkat Daerah		6.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	5.706.122.505,00	7.904.967.067,00	6.477.165.635,00	771.043.130,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			6.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani					61 Orang	61 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Perangkat Daerah		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	50.000.000,										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	52.205.950,00	22.110.750,00	15.385.750,00	-36.820.200,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			57.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	56.820.000,00	56.820.000,00	56.820.000,00	0,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	145.418.000,00	118.791.000,00	70.527.084,00	-74.890.916,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	-2.270.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			2.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.236.067.800,00	1.438.087.800,00	734.643.900,00	-501.423.900,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			1.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000 Dokumen	1000 Dokumen	94.700.000,00	108.405.700,00	54.284.500,00	-40.415.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			96.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana prasarana yang diadakan				11 Unit	11 Unit	105.000.000,00	708.450.000,00	180.000,00	-104.820.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	120 Unit	0,00	83.450.000,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	105.000.000,00	625.000.000,00	180.000,00	-104.820.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rutin				12 Bulan	12 Bulan	539.600.000,00	586.899.500,00	537.385.716,00	-2.214.284,00			-		Perangkat Daerah		565.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	288.204.500,00	275.204.500,00	-4.795.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			290.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	239.600.000,00	278.695.000,00	250.181.216,00	10.581.216,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>				94 Unit	94 Unit	330.950.000,00	435.950.000,00	210.760.000,00	-120.190.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Perangkat Daerah		343.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				81 Unit	81 Unit	175.000.000,00	185.000.000,00	130.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	12 Unit	105.950.000,00	105.950.000,00	80.760.000,00	-25.190.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			108.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	145.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS</i>				-	100 %	417.545.252.977,00	425.126.136.856,00	414.600.316.950,00	27.787.747.023,00							445.333.000.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Jumlah kegiatan di APBD sesuai dengan KUA PPAS di bagi jumlah kegiatan APBD</i>				-	100 %	1.254.022.000,00	792.559.000,00	217.860.400,00	-1.036.161.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Perangkat Daerah		1.183.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	51.603.000,00	51.603.000,00	13.725.750,00	-37.877.250,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	57.403.000,00	57.403.000,00	14.800.700,00	-42.602.300,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				53 Dokumen	53 Dokumen	59.500.000,00	45.600.000,00	6.025.000,00	-53.475.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			62.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				53 Dokumen	53 Dokumen	35.750.000,00	33.700.000,00	3.875.000,00	-31.875.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				107 Dokumen	107 Dokumen	48.500.000,00	0,00	0,00	-48.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				107 Dokumen	107 Dokumen	24.750.000,00	0,00	0,00	-24.750.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			26.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	174.136.000,00	181.730.000,00	147.975.000,00	-26.161.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	113.734.000,00	127.660.000,00	27.510.000,00	-86.224.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			115.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	688.646.000,00	294.863.000,00	3.948.950,00	-684.697.050,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			690.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan perbendaharaan daerah				49 OPD	49 OPD	437.570.000,00	327.876.000,00	146.836.500,00	-290.733.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Perangkat Daerah		445.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	233.840.000,00	232.840.000,00	101.915.000,00	-131.925.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			235.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				184 Dokumen	184 Dokumen	17.330.000,00	17.330.000,00	8.495.000,00	-8.835.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	2 Dokumen	102.950.000,00	40.310.000,00	34.145.000,00	-68.805.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																			
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5 Dokumen	5 Dokumen	83.450.000,00	37.396.000,00	2.281.500,00	-81.168.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang dibinadalam penyusunan laporan keuangan				51 OPD	51 OPD	279.058.000,00	227.736.000,00	101.498.800,00	-177.559.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Perangkat Daerah		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				79 Laporan	79 Laporan	60.565.000,00	37.443.000,00	30.139.000,00	-30.426.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			62.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																			
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				5 Laporan	5 Laporan	129.545.000,00	109.555.000,00	57.394.800,00	-72.150.200,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			135.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				51 Laporan	51 Laporan	34.136.000,00	31.077.000,00	840.000,00	-33.296.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																			
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.811.000,00	4.811.000,00	750.000,00	-4.061.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	18.580.000,00	13.429.000,00	3.825.000,00	-14.755.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	31.421.000,00	31.421.000,00	8.550.000,00	-22.871.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah desa penerima DD,ADD,bagi hasil pajak dan retribusi				266 Laporan	266 Laporan	415.533.722.977,00	423.737.085.856,00	414.094.121.250,00	-1.439.601.727,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Perangkat Daerah		443.360.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				266 Laporan	266 Laporan	377.177.014.550,00	375.543.884.401,00	365.867.105.377,00	-11.309.909.173,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			410.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	5.000.000.000,00	-2.500.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			2.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	30.856.708.427,00	40.693.201.455,00	43.227.015.873,00	12.370.307.446,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			30.860.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Data Base Sistem Informasi Keuangan yang terpelihara				2 Dokumen	2 Dokumen	40.880.000,00	40.880.000,00	40.000.000,00	-880.000,00			-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Perangkat Daerah		45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40.880.000,00	40.880.000,00	40.000.000,00	-880.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik				100.00 %	100.00 %	3.986.440.000,00	2.168.125.000,00	1.215.611.500,00	97.560.000,00							4.084.000.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah aset daerah yang teraudit tahun n-1 dibagi jumlah aset daerah n-1 kali 100% Jumlah barang milik daeah yang dikelola				100 % 100 persen	100 % 100 persen	3.986.440.000,00	2.168.125.000,00	1.215.611.500,00	-2.770.828.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel	Perangkat Daerah		4.084.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	143.400.000,00	345.000.000,00	144.787.500,00	1.387.500,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			146.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	6.125.000,00	-13.875.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	207.600.000,00	844.725.000,00	260.320.000,00	52.720.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			210.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.090.000,00	78.995.000,00	-1.005.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	315.600.000,00	574.780.000,00	544.100.000,00	228.500.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			318.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				12 Laporan	12 Laporan	3.219.840.000,00	303.530.000,00	181.284.000,00	-3.038.556.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel			3.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H								430.145.058.732,00	438.967.745.173,00	424.167.639.035,00	-5.977.419.697,00							459.076.500.000,00	